



PRAKTIK *SUSTAINABLE TOURISM*, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

Tim Penyusun:

Departemen III - Analisis Kebijakan

1. Riskha Tri Budiarti, M.Sc
2. Luthfi Aqrobah, S.Si



PRAKTIK *SUSTAINABLE TOURISM*, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

Tim Penyusun:

Departemen III – Riset dan Analisis Kebijakan

1. Riskha Tri Budiarti, M.Sc
2. Luthfi Aqrobah, S.Si

I. PENGANTAR

Industri pariwisata hari ini diposisikan sebagai *leading sektor* dan diklaim menyumbang 9% dari PDB global. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO, pariwisata juga menyumbang 29% dari ekspor jasa di seluruh dunia¹ dan menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 5%. Memiliki pertumbuhan sebesar 25% antara tahun 1995 dan 2005, pariwisata menyumbang 10% aktivitas ekonomi dunia dan dilaporkan menjadi salah satu penghasil utama lapangan kerja. Industri pariwisata menempati urutan ke-6 dalam perdagangan internasional setelah perdagangan bahan bakar fosil, telekomunikasi dan peralatan komputer, produk otomotif, dan pertanian². Menurut *World Travel and Tourism Council*, pariwisata menyediakan 1 dari 11 pekerjaan di seluruh dunia.³

Impikasi secara global dalam beberapa tahun terakhir terlihat pertumbuhan yang signifikan dan diperkirakan akan terus berlanjut, terutama di negara berkembang. Karena bagi negara berkembang, pariwisata menempati sumber pendapatan devisa utama dan bahkan jumlah perjalanan internasional diperkirakan hampir dua kali lipat hingga tahun 2020 dibandingkan tahun 2006⁴. Di Indonesia, pariwisata pertama kali ditetapkan sebagai *core* ekonomi pada 2016. Jokowi menetapkan pariwisata sebagai *leading sektor* pembangunan ekonomi nasional.⁵ Pembangunan pariwisata diyakini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang *pro-poor, pro-growth, pro-lingkungan*, dan *pro-pekerjaan*.

Hanya saja banjir wisatawan itu disadari banyak pihak tidak hanya menjadi “madu” tapi sekaligus dianggap “racun” (*tourism can be both a blight and a blessing*). Dalam hal inilah UNWTO merasa perlu memperkenalkan perencanaan dalam pengembangan pariwisata dengan menggunakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagai bagian dari *sustainable development* yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sustainable tourism (ST) menurut UNWTO adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat tuan rumah.

Di Indonesia, *sustainable tourism* sudah mendapat perhatian yang cukup dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Bahkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 menyebutkan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu kata

¹ *Sustainable Tourism For Development Guidebook, Enhancing Capacities For Sustainable Tourism For Development In Developing Countries*, UNWTO, 2013.

² *Sustainable Tourism Development In UNESCO Designated Sites In South-Eastern Europe*, UNEP

³ *Sustainable Tourism: A Driving Force Of Job Creation, Economic Growth And Development*

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_480824/Lang--En/Index.Htm

⁴ *Sustainable Tourism Development In UNESCO Designated Sites In South-Eastern Europe*, UNEP

⁵ <https://www.beritasatu.com/asnie-ovier/gaya-hidup/580280/pariwisata-jadi-sektor-prioritas-unggulan-pemerintahan-jokowis>

kunci dalam visinya.⁶ Untuk Provinsi Lampung misalnya sudah ada dalam RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Namun dalam pelaksanaannya memang tidak mudah.⁷

UNWTO dan UNEP (*United Nations Environment Programme*) selanjutnya menyusun sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sustainable tourism*, yaitu: 1) Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen utama dari pembangunan kepariwisataan, menjaga keutuhan ekologi dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. 2) Menghargai karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan nilai - nilai tradisi, serta berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi. 3) Menjamin keberlanjutan usaha, menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang terdistribusikan secara merata bagi para pemangku kepentingan, termasuk berupa kesempatan kerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan, tersedianya pelayanan dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Meskipun secara konsep ST ini bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah diadopsi dalam regulasi pariwisata di Indonesia. Namun dalam tataran realita nampaknya masih banyak menyisakan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu dalam makalah ini kami akan membandingkan secara kualitatif antara konsep ST dengan pelaksanaan ST di Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Sebagaimana yang didefinisikan UNWTO bahwa *sustainable tourism* adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan di masa depan. Dan selanjutnya ditetapkan prinsip-prinsip pengembangan *sustainable tourism* yang meliputi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Namun, benarkah realitas pengembangan *sustainable tourism* sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang diharapkan?

Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan konsep *sustainable tourism* khususnya di Indonesia. Apakah sudah terwujud keseimbangan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial?

III. PEMBAHASAN

Pada bagian ini, kami akan menganalisis berdasarkan realita pelaksanaan konsep ST khususnya di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

⁶ Rencana Strategis Kemenparekraf 2020-2024

⁷ Wawancara dengan Dr. Ir Citra Persada, M.Sc., konsultan pariwisata

ASPEK EKONOMI: Ilusi Kesejahteraan Ekonomi Melalui *Sustainable Tourism*

Pariwisata selalu diopinikan memberikan dampak positif secara ekonomi seperti pembukaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dll. Namun pada faktanya, industri pariwisata menimbulkan tidak sedikit pengaruh negatif diantaranya *economic leakages* (kebocoran ekonomi), *enclave*, inflasi, tingginya pembiayaan infrastruktur dan fasilitas, ketergantungan sektoral, dan masalah musiman.

Dari sekian banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan, *economic leakages* dianggap masalah yang paling sulit untuk diatasi karena iklim liberalisasi hari ini memberikan karpet merah pada pihak asing melalui MNC untuk menguasai bisnis di pasar domestik sehingga *economic leakages*⁸ tidak dapat dihindari. Dengan kata lain *leakages* merupakan keniscayaan pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini. Yang biasanya dilakukan pemerintah hanyalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya *economic leakage*⁹.

1. *Economic Leakage*

Leakage atau kebocoran ekonomi artinya bahwa pengeluaran pada sektor pariwisata terjadi di luar destinasi. *Leakage* ada yang bersifat eksternal dan ada yang internal. *External leakages* terjadi pada pembangunan destinasi wisata khususnya pada negara berkembang yang cenderung memerlukan modal dan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wisata lainnya. Lain faktor yang menyebabkan, yaitu *pertama*, investor asing membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata pada negara sedang berkembang, sehingga profit dan pembayaran terjadi di luar negeri. *Kedua*, Arus uang bisnis pariwisata langsung terjadi di luar negeri dikarenakan *booking* bisa dilakukan di luar negeri atau terjadi secara online, wisatawan datang dengan maskapai penerbangan asing, *cruise ship* atau kapal pesiar, atau bentuk usaha lain yang dimiliki oleh orang asing.

Masalah ekonomi akibat kebocoran ini bahkan bisa lebih parah ketika masyarakat didesak melepas lahan pertanian atas nama pembangunan berbagai infrastruktur pendukung industri pariwisata. Selanjutnya, penanam modal asing yang memiliki modal yang kuat diundang masuk untuk membangun resort atau hotel serta fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Inilah yang terjadi seperti di Indonesia yang menurut Menteri Pariwisata periode pertama Jokowi, Arief Yahya bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia mayoritas dikuasai asing yang prosentasenya bahkan sampai mencapai 90% di tahun 2017. Artinya hanya 10 persen yang dikuasai investor lokal.¹⁰

⁸ *Economic leakages* dapat bersifat external, internal, dan *invisible leakages*, dimana ketiga jenis *leakages* tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

⁹ I Nyoman Sukma Arida, Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan (Sustain Press, Tanpa Tahun)

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/483285/menpar-investor-lokal-enggan-garap-sektor-pariwisata>

Bahkan dalam upaya menggenjot investasi pada industri pariwisata ini, pemerintah telah melakukan deregulasi untuk bidang usaha galeri seni, galeri pertunjukan seni, perusahaan pariwisata alam berupa perusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata dalam kawasan hutan, dengan mengizinkan asing untuk menguasai 100 persen kepemilikannya.¹¹ Dengan demikian masalah kebocoran ekonomi ke luar negeri bisa menjadi semakin besar.

Sementara *internal leakage* terjadi karena naiknya permintaan terhadap peralatan-peralatan berstandar internasional yang digunakan dalam industri pariwisata, bahan makanan dan minuman import yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat lokal atau dalam negeri, termasuk pekerja asing yang dipandang lebih kapabel. Besarnya pendapatan dari sektor pariwisata menuntut besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan import terhadap produk yang dianggap berstandar internasional, terutama pada destinasi wisata yang mengejar standar internasional. Menurut laporan UNEP rata-rata *internal leakages* pada kebanyakan negara sedang berkembang berada pada kisaran 40 sampai dengan 50% dari total penerimaan kotor sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil.

2. *Enclave Tourism*

Dalam *enclave tourism*, segala hal diatur oleh operator tur atau *all in*. Wisatawan didorong untuk tetap tinggal. Mereka sering didorong untuk tidak meninggalkan hotel mereka karena wisatawan membeli paket liburan yang mencakup semua yang mereka butuhkan mulai dari transportasi hingga makanan, minuman bahkan hiburan. Turis tidak perlu meninggalkan resor. Tapi faktanya seringkali tidak demikian, karena kenyataannya, sebuah destinasi wisata seringkali diperlakukan hanya sebagai tempat persinggahan sehingga tidak berimplikasi pada meningkatnya pendapat masyarakat lokal.

Sebagai contohnya, sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar dimana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewati malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal sebagai akibatnya dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sebuah destinasi yang dikunjunginya. Kenyataan lain yang menyebabkan “*enclave*” adalah kedatangan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “*origin country*”. Misalnya mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, menginap di hotel milik manajemen chain dari negara mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Walhasil dalam kasus *enclave*, faktanya sangat sedikit uang yang mencapai tujuan tempat pariwisata berlangsung. Dalam kasus seperti Maladewa atau Karibia, dilaporkan sebanyak 95% dari uang yang dihasilkan oleh pariwisata ternyata meninggalkan negara itu melalui kebocoran ekonomi. Bahkan untuk kasus Gambia lebih parah lagi. Saat pemerintah Gambia mencoba melarang resor *all-in*, operator tur mengancam akan membawa bisnis mereka ke tempat lain dan ancaman tersebut sukses membuat larangan dari pemerintah akhirnya dicabut¹².

3. Pembiayaan Infrastruktur (*Infrastructure Cost*)

Demi mengejar pembangunan industri pariwisata yang berstandar internasional pemerintah khususnya di negara berkembang harus pontang panting mencari pembiayaan yang akhirnya menjadi beban tersendiri. Selain dari anggaran belanja pusat maupun daerah, juga dari pinjaman asing yang tentu saja bukan tanpa kompensasi. Implikasinya –yang biasa menjadi jalan pintas pemerintah—adalah digenjotnya sektor pajak untuk menutup pembiayaannya. Dengan kata lain, pungutan pajak terhadap masyarakat menjadi harus dinaikkan. Implikasi lainnya, pemerintah biasanya melakukan re-alokasi anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan dan sektor lainnya. Dalam konteks Indonesia, sejak pencanangan target pariwisata besar-besaran, dengan menjadikan sepuluh destinasi wisata “Bali Baru”, pembangunan infrastruktur turut dikejar besar-besaran guna menunjang tercapainya sepuluh “Bali Baru” tersebut. Pembiayaan infrastuktur di Indonesia sebagian besar diperoleh dari dana utang. Baik utang dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun pemerintah mengatakan bahwa utang Indonesia masih pada derajat aman, namun dengan adanya pandemic Covid-19 yang sangat memukul sektor pariwisata nampaknya biaya ekonomi yang harus ditanggung lebih besar daripada nominal utang untuk infrastuktur. Hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari sektor pariwisata akan menambah beban ekonomi selain utang. Untuk lima kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas saja Kementerian PUPR menganggarkan 6 Triliun dalam rangka membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, penampung air, serta hunian pendukung.¹³

4. Peningkatan Harga (*Inflation*)

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun. Benar pendapatan masyarakat lokal berpotensi meningkat namun tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga sehingga tetap saja menyebabkan daya beli masyarakat lokal menjadi rendah. Belum lagi peningkatan industri pariwisata juga berimbas pada meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga properti lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tidak mampu membeli dan cenderung akan tergusur ke daerah pinggiran yang harganya masih dapat dijangkau. Padahal awalnya bisa jadi mereka adalah

¹² <https://tourismteacher.com/economic-leakage-tourism/>

¹³ Liputan6.com 20 Februari 2020 diakses 16 Maret 2021

tuan tanah yang terpaksa harus menjual tanahnya atas nama pembangunan pariwisata. Konsekuensi logis lainnya, pembangunan pariwisata juga berdampak pada meningkatnya harga-harga barang konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya sehingga pemenuhan akan kebutuhan pokok justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah negara.

Seperti yang terjadi pada pembangunan Tol Solo-Jogja yang membuat naiknya harga tanah-tanah di sekitar sampai 3,5 kali lipat. Proyek tol ini memang didesain untuk mendukung infrastruktur pariwisata Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang). Atau sebagaimana yang terjadi pada pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur, di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meski tidak terkait dengan pariwisata, tapi ada pola yang sama dari sisi pengaruh pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan umum terhadap kenaikan barang dan jasa di lokasi sekitar. Warga mengakui banyak risiko yang dihadapi setelah mendapat ganti rugi tanah, mulai dari naiknya harga tanah-tanah di sekitar, termasuk harga material untuk membangun rumah baru juga mengalami kenaikan. Belum lagi pajaknya juga mahal kecuali jika membeli tanah di daerah yang agak pedalaman, tapi untuk memulai usaha lagi di daerah seperti itu jadi tidak sepadan juga dengan yang dahulunya mereka dapatkan. Padahal kalau uang ganti ruginya hanya disimpan di bank akan ada risiko termakan inflasi juga¹⁴.

5. Ketergantungan Ekonomi (*Economic Dependence*)

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara. Terlebih jika negara mampu menjaga rantai industrinya di berbagai sektor. Sebaliknya jika sebuah negara hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, akan menjadikan negara tersebut menjadi tergantung pada satu dua sektor saja sehingga berisiko tinggi terhadap ketahanan ekonominya. Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing menjadi alarm hilangnya kemerdekaan sosial dan secara politik ekonomi yang bisa berkontribusi pada hilangnya kemandirian negara. Padahal hari ini dunia mengkampanyekan industri pariwisata sebagai *leading sektor* dengan berbagai “mantra” yang seolah sakti untuk peningkatan pendapatan masyarakat sampai negara. Bahkan ditengah situasi pandemi pun, pariwisata justru dihidupkan karena diharapkan menjadi sektor yang mampu memulihkan kelesuan ekonomi akibat pandemi.

6. Masalah Musiman (*Seasonal Characteristic*)

Dalam industri pariwisata, dikenal adanya musim-musim tertentu, seperti misalnya musim ramai (*high season*) dimana kedatangan wisatawan akan mengalami puncaknya, tingkat hunian kamar mendekati tingkat hunian kamar maksimal dan kondisi ini akan berdampak meningkatnya

¹⁴ Dwi Setianingsih, Tesis. *Dampak Sosial Pembebasan Tanah Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: UI, 2012), hlm 246.

pendapatan bisnis pariwisata. Kebalikan dari *high session* adalah *low season* dimana secara umum pendapatan pelaku bisnis pariwisata menurun dan sering disebut “*problem seasonal*”. Di masa ini para pekerja yang berkaitan dengan industri pariwisata khususnya para pekerja informal seperti supir taksi, para pemijat tradisional, para pedagang asongan dimana mereka semua sangat tergantung pada kedatangan wisatawan, pada kondisi *low season* sangat dimungkinkan mereka tidak memiliki lahan pekerjaan yang pasti dan harus beralih dulu pada pekerjaan lainnya jika ada.

Implementasi Sustainable Tourism di Indonesia: Menguntungkan Siapa?

World Economic Forum (WEF) di tahun 2010 sempat menilai Indonesia minim dalam implementasi pariwisata berkelanjutan. Indonesia dipandang lemah dalam (i) kebijakan dan regulasi, (ii) pariwisata berkelanjutan, (iii) keselamatan dan keamanan, (iv) kesehatan, dan (v) informasi dan komunikasi teknologi¹⁵.

Melalui arahan UNWTO sebagaimana yang diakui Menteri Pariwisata periode pertama Jokowi, Arief Yahya, Indonesia kemudian semakin serius mengembangkan Sustainable Tourism Development (STD), Sustainable Tourism Observatory (STO), dan menuju Sustainable Tourism Certification (STC). Kemenpar membentuk Pokja Pariwisata Berkelanjutan dan sejak 2016, melalui SK Menpar no 14/2016, pemerintah membangun 5 model STO, yang menjadi bagian dari UNWTO. Keseriusan pemerintah menghantarkan Indonesia di tahun 2019 menjadi negara kedua di Asia Pasifik setelah Cina yang mengembangkan konsep sustainable tourism ini.¹⁶

Dalam implementasinya, Kemenpar menggandeng Global Sustainable Tourism Council (GSTC) melakukan penilaian snapshot atau penilaian cepat terhadap beberapa tujuan destinasi wisata di Indonesia yang menjadi lima model STO dan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di daerahnya masing-masing. Kelima STO itu adalah: Pangandaran (bersama ITB Bandung), Sleman Jogjakarta (dengan UGM), Sasaot Lombok (dengan Universitas Mataram), Samosir (dengan Universitas Sumatera Utara), dan Sanur Bali (dengan Universitas Udayana).

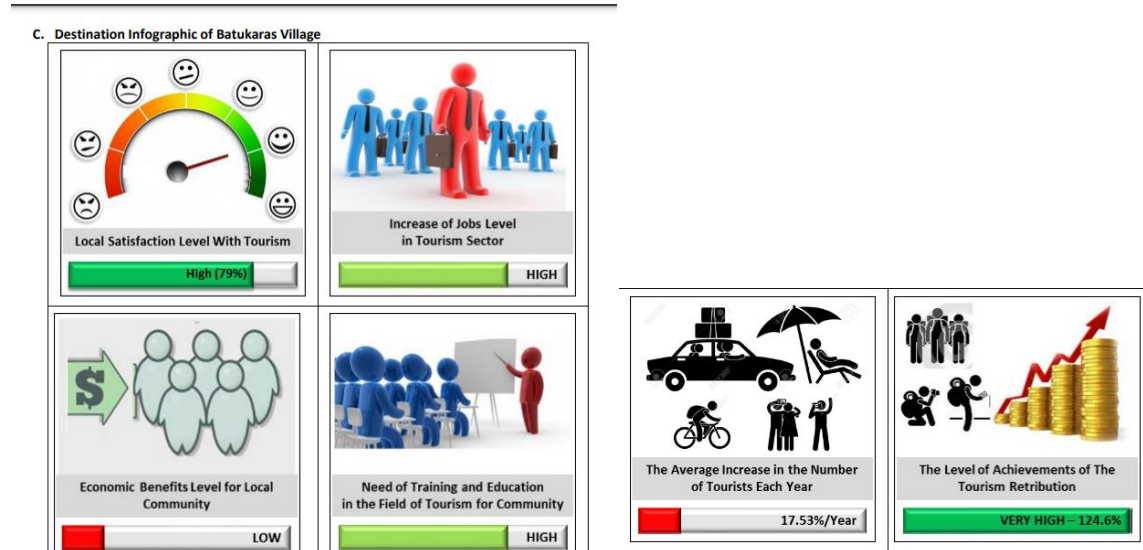
Setelah 5 lokasi berjalan, selanjutnya dikembangkan 7 titik lagi, yang semua berada di kawasan yang sedang dikembangkan sebagai 10 Bali Baru, atau 10 Destinasi Prioritas. Diantaranya, Tanjung Lesung Banten (dengan Universitas Indonesia), Tanjung Kelayang Belitung (dengan IPB Bogor), Kepulauan Seribu Jakarta (dengan Universitas Pancasila), Bromo Tengger Semeru – BTS (dengan Unair Surabaya), Labuan Bajo Komodo (dengan Universitas Flores), Wakatobi Sultra (dengan Universitas Hasanuddin Makassar) dan Morotai Maluku Utara (dengan Universitas Khairun).

¹⁵ Indonesia Monitoring Center for UNWTO Sustainable Tourism Observatories 2018, Annual Report, Ministry of Tourism Republik of Indonesia, Deputy of Tourism Destination Development

¹⁶ <https://www.indonesiatravel.news/pariwisata/unwto-dukung-sustainable-tourism-development-di-indonesia/>

Tahap berikutnya Kemenpar membentuk ISTC (Indonesia Sustainable Tourism Council), untuk menyusun *guidelines* dan program sertifikasi. Kemenpar menggandeng GSTC, membuat ToT (*Training of Trainers*) dan mengeluarkan sertifikat pariwisata berkelanjutan. Sertifikasi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Organisasi Manajemen Destinasi untuk meningkatkan skor penilaian oleh GSTC sebelumnya.

Kemenpar pun sudah mengeluarkan laporan tahunan (2018) hasil monitoring terhadap *pilot project* lima STO. Dari setidaknya 41 indikator wajib yang ditetapkan UNWTO, secara umum lima STO tersebut dinilai dalam kondisi yang baik. Bahkan seperti Pangandaran (wisata Batukaras) dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan semua mendapat nilai diatas 75% atau berada di level yang tinggi. Demikian juga dengan poin kepuasan masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata setempat juga mendapat nilai tinggi. Hanya saja yang janggal, dilaporkan juga bahwa tingkat kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal berada pada level yang rendah, padahal sebelumnya dikatakan bahwa dampak ekonominya tinggi. Lantas dampak ekonomi tinggi ini dinikmati siapa?



ASPEK SOSIAL

Meskipun pariwisata membawa kesempatan positif bagi orang miskin, terkadang juga membawa dampak negatif pada struktur sosial, tradisi, dan kehidupan lokal. Hal ini mungkin akan datang dari peningkatan kompetisi terhadap sumber daya, kenaikan harga barang, dan perubahan sosial yang menyebabkan peningkatan kriminalitas, penurunan nilai tradisional, dan juga problem lain seperti eksploitasi seksual yang meningkat karena perilaku turis dan pengaruh baru.

Sebagai contoh kita bisa lihat perubahan kehidupan sosial di Pulau Bali. Sebelum terjadi arus masuk yang besar-besaran wisatawan mancanegara ke Pulau Bali. Kehidupan sosial masyarakat Pulau Bali banyak dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Bali. Setelah Bali menjadi destinasi wisata turis mancanegara, budaya kebebasan lebih mendominasi mengikuti budaya kebanyakan turis mancanegara.

Dalam sejarahnya pariwisata memang berawal dari adanya kemudahan transportasi. Pada saat itu dikenal dengan 3T (Trade, Travel, dan Tourism). Lalu pariwisata ini merupakan usaha orang-orang untuk mencari kesenangan yang termanifestasi dari 3S (Sun, Sea, Sex).¹⁷ Maka tidak heran jika pada praktiknya di banyak obyek wisata terjadi eksploitasi lingkungan dan seksual. Meskipun saat ini sudah muncul kesadaran atau warna lain dalam konsep maupun pelaksanaan pariwisata, seperti sustainable tourism dan wisata halal, kita masih melihat banyak sekali praktik eksploitasi lingkungan dan seksual yang terjadi di kawasan wisata.

Pariwisata Sebagai Sektor Jasa. Pariwisata Eksklusif, Privatisasi Ruang Publik?

Sebagai sebuah bisnis, pariwisata tentunya memiliki tujuan keuntungan secara ekonomi. Pemerintah dan para investor yang telah menanamkan modal untuk membangun sebuah obyek wisata tentu menginginkan modalnya berkembang. Sehingga untuk dapat menikmati produk jasa yang ditawarkan, seseorang harus membelinya. Yang tidak mampu membeli, maka tidak dapat menikmati jasa pariwisata tersebut. Hal ini menimbulkan masalah ketika produk pariwisata melibatkan keindahan alam atau keindahan obyek yang seharusnya menjadi ruang publik. Keindahan pantai, bukit, sumber air, bahkan sebuah pulau yang merupakan ruang publik, berubah menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh orang yang mampu membelinya.

Keberadaan pulau-pulau privat yang dikelola oleh investor resort baik domestic maupun asing merubah status pulau ruang publik menjadi ruang privat. Begitu pula keberadaan resort di bibir pantai yang sekaligus menutup akses garis pantai sepanjang resort untuk umum juga merubah status garis pantai yang merupakan ruang publik menjadi ruang privat. Dengan ini tak jarang penduduk lokal justru tidak mampu menikmati ruang publik yang lokasinya berada di area tinggal mereka karena tidak mampu membayarnya. Dalam kasus ini aspek sosial harus dipinggirkan demi keuntungan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Pantai Ngrawe, di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang dibangun resort megah milik warga asing dari Belanda. Lahan puluhan hektar beserta bukit yang ada di Pantai tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh pemilik lahan. Jalan masuk pantai itu pun diportal, warga atau wisatawan yang hendak menuju pantai pun kesulitan. Pantai itu pun tampak seperti pantai pribadi yang tak semua orang boleh masuk. Menurut penuturan warga hampir sebagian besar lahan di sekitar pantai yang ada di wilayah Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul telah dimiliki oleh pribadi. Hal tersebut sempat menyulut ketegangan antara warga pesisir yang tinggal dan mencari nafkah di pantai tersebut dengan pemilik modal yang mengaku mengantongi surat kekancingan Sultanaad Ground (SG) dari Keraton untuk membangun resort ataupun hotel. Konflik juga sempat terjadi di Watukodok, saat investor yang mau membangun hotel atau resort tapi tidak

¹⁷ Wawancara dengan Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.

memperbolehkan warga untuk masuk dan mencari nafkah lagi. Padahal warga tidak mau digusur, karena sejak dulu mereka sudah ada disana.¹⁸

Keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata kerap menjadi sumber konflik ketika investor luar masuk. Investor tentu mengejar keuntungan dari modal yang telah mereka keluarkan. Tak jarang demi menggenjot keuntungan tersebut, keterlibatan masyarakat lokal justru dianggap menjadi pengganggu atau pesaing. Hal ini misal terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Masyarakat lokal sebelumnya sudah mengelola obyek Pulau Pari secara Swadaya. Namun Pengembang atas nama PT. Bumi Pari Asri dan PT. Bumi Griya Nusa mengklaim memiliki sertifikat hak guna lahan terhadap lahan di kawasan Pulau Pari. Maka terjadilah konflik antara masyarakat dengan warga Pulau Pari. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah yang seharusnya lebih memberikan ruang terhadap penduduk lokal. Karena sejatinya mereka lah yang berhak untuk mengelola kawasan wisata yang merupakan wilayah mereka untuk hidup. Selain itu, keberpihakan terhadap masyarakat akan berdampak pada pemerataan pendapatan. Dengan begitu, keseimbangan ekonomi dan sosial menemukan realitanya.

Pengembangan ST sudah seharusnya memberikan perhatian yang sama terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jangan sampai salah satu aspek lebih mendominasi daripada aspek yang lain. Pada faktanya masih banyak terjadi dominasi aspek ekonomi daripada aspek sosial dan lingkungan. Keberadaan Pulau Komodo yang akan dijadikan kawasan wisata premium akan mengancam kawasan konservasi Pulau Komodo.

Garis sepadan pantai 100 meter dari bibir pantai adalah ruang publik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran. Di Indonesia, mungkin hanya Provinsi Bali yang betul-betul menerapkan ruang public garis sepadan 100 meter dari bibir pantai. Sedangkan yang di daerah lain, banyak resor, hotel, bahkan sampai apartemen yang menutup akses publik terhadap garis sepadan 100 meter dari bibir pantai ini.

Kode Etik Pariwisata: Jerat Penjajahan Melalui Pariwisata

Indonesia menjadi penandatanganan pertama *Framework Convention on Tourism Ethics*, yang diklaim sebagai instrumen penting untuk memastikan pariwisata global yang adil, inklusif, lebih transparan, dan bekerja untuk semua orang. Penandatanganan diselenggarakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) di Madrid ini merupakan bagian dari langkah menuju ratifikasi konvensi, yang diadopsi pada pertemuan ke-23 Sidang Umum UNWTO pada September 2019. Dalam masa krisis terbesar dalam sejarah kepariwisataan dunia, negara-negara anggota mengharapkan UNWTO tegas dan tetap berkomitmen pada misinya dan menggunakan jeda akibat pandemi sebagai kesempatan menyelaraskan kembali pariwisata. Konvensi tersebut

¹⁸ <https://joglosemarnews.com/2018/03/asing-kuasai-sebagian-besar-lahan-pantai-di-gunungkidul-seperti-ini-nasib-warga-di-sana/>

dipandang sebagai “langkah maju yang besar” untuk memperkenalkan kode etik pariwisata yang universal dan mengikat.

ASPEK LINGKUNGAN

Pariwisata diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu dari sepuluh ssektor yang mendorong perubahan menuju Ekonomi Hijau dan sebelumnya termasuk dalam Dokumen Hasil Rio + 20 sebagai salah satu ssektor yang mampu membuat “signifikan kontribusi pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, memiliki keterkaitan erat dengan ssektor lain, dan dapat menciptakan pekerjaan yang layak dan menghasilkan peluang perdagangan.”

Kerusakan lingkungan karena pengembangan pariwisata juga banyak terjadi pada obyek-obyek wisata di Indonesia. Pada wisata bahari kita seringkali melihat banyaknya dampak kerusakan alam akibat pengembangan pariwisata yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Mulai dari rusaknya terumbu karang, penumpukan sampah plastic, hingga rusaknya rutan mangrove yang menopang ekosistem pesisir.

Terdapat beberapa studi yang menunjukkan wisata seperti wisata selam, snorkeling, dapat memengaruhi kondisi terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung diakibatkan dari aktivitas penyelaman seperti penambatan jangkar kapal hingga perilaku wisatawan yang merusak terumbu karang. Penyebab tidak langsung disebabkan pembangunan infrastruktur seperti penginapan, restoran, dan lain-lain.

Ancaman juga terjadi pada hutan mangrove yang merupakan daerah konservasi pesisir. Di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung misalnya. Pada tahun 1990-an, Pulau Pahawang hanya dibuka bagi para peneliti, namun sejak tahun 2010-an Pulau ini dibuka untuk umum. Akibatnya banyak yang menginjak terumbu karang dan adanya penebangan hutan mangrove oleh para investor mengancam keberadaan hutan mangrove dan terumbu karang di sekitar Pulau Pahawang.¹⁹

Begitu pula yang terjadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas. Sejak dibangun jalan yang membelah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, akses mudah sehingga banyak wisatawan menyebabkan banyak flora dan fauna yang hilang. Sedangkan di Tanam Nasional Way Kambas, terjadi semacam eksploitasi terhadap Gajah. Taman yang awalnya untuk penjinakan gajah tersebut berubah menjadi tempat wisata yang mempertontonkan gajah dengan berbagai atraksi yang menurut peneliti di luar kealamian kehidupan gajah.²⁰

Dampak kerusakan lingkungan juga terjadi pada wisata dataran tinggi. Alih fungsi kawasan hutan konservasi Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) misalnya. Kawasan hutan beralih menjadi bangunan seperti rumah peristirahatan, penginapan, hotel, dan restoran. Hal ini menyebabkan tidak

¹⁹ Wawancara dengan konsultan Pariwisata Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.

²⁰ idem

optimalnya peresapan air ke dalam tanah, akibatnya sumber mata air berkurang dan air hujan jatuh ke daerah yang tidak kondusif untuk peresapan air, sehingga memicu erosi, longsor, dan banjir.

Pembangunan hotel yang masif di daerah wisata seperti kota Yogyakarta dan Kawasan Labuan Bajo NTB juga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air secara signifikan bagi penduduk sekitar. Sebagaimana dilaporkan dalam sebuah video dokumenter yang ditayangkan saluran Youtube Watchdog, karena air banyak tersedot bagi kebutuhan ratusan kamar mandi dan kolam renang tiap hotel, masyarakat sekitar menjadi kekurangan air.

IV. PENUTUP

Pelaksanaan konsep ST di Indonesia tampaknya masih jauh dari kata ideal. Meskipun secara regulasi sudah diadopsi, hanya saja praktiknya terjadi ketidakseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. masih banyaknya kasus-kasus kalahnya kepentingan lingkungan dan sosial dengan kepentingan ekonomi menunjukkan bahwa penerapan ST secara menyeluruh belum terjadi. Bahkan tak jarang pemerintah yang menjadi actor dibalik itu. Kepentingan ekonomi yang dimenangkan juga seringkali hanyalah kepentingan ekonomi para investor. Kalaulah ada keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan kerusakan sosial dan lingkungan yang harus mereka tanggung.



INSTITUT MUSLIMAH NEGARAWAN

 @imuneofficial  Muslimah Negerawan  t.me/muslimahnegarawan  www.imune.id